



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GERSON PARARAK
2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. NHK : 754215

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 262.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, LEXI SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER PX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 45.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 45.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.842.500.000

III. HUTANG

Rp. 471.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.371.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.